



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 199 TAHUN 1961 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 237)  
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK  
DAN GAS NASIONAL (PERMIGAN)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan berkembangnya tugas P.N. Permigan dipandang perlu untuk memperluas susunan Direksi Perusahaan Negara tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 237) dari tiga orang menjadi lima orang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);  
3. Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 237);  
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;

Memutuskan:

Menetapkan : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 237) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan).

#### Pasal I.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No.237) diubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh empat orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing".

#### Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 1963.  
Pj. Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 1963.  
Sekretaris Negara,  
ttd  
A.W. SURJOADININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 80